

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam berinteraksi atau berhubungan dengan masyarakat, manusia akan mengalami permasalahan sosial atau penyimpangan atas norma yang ada. Salah satu permasalahan sosial yang terjadi di kehidupan bermasyarakat adalah keberadaan Wanita Tuna Susila (WTS). Wanita Tuna Susila merupakan wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin diluar perkawinan, baik dengan imbalan jasa ataupun tidak. Kegiatan yang dilakukan Wanita Tuna Susila tersebut sering disebut dengan prostitusi. Prostitusi pada hakekatnya dapat dimaknai sebagai perilaku yang berganti-ganti pasangan, dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Di Indonesia praktek prostitusi lebih banyak dilakukan oleh wanita meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa mulai banyak juga terdapat praktek-praktek prostitusi kaum pria.

Alasan utama dari terjunnya seseorang pada praktek prostitusi adalah masalah ekonomi. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang terbatas serta perilaku demoralisasi mereka yang melihat prostitusi sebagai salah satu pekerjaan sekaligus profesi yang sangat menjanjikan untuk memperoleh banyak uang. Dengan demikian, faktor yang paling menentukan keterlibatan seseorang dalam praktek prostitusi adalah tekanan ekonomi. Sofyan (2015) menyatakan bahwa krisis moneter yang

memberi dampak pada ekonomi masyarakat mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Hal ini mendorong mereka bekerja diluar ketentuan hukum, moral, dan etika misalnya mencuri, dan bekerja sebagai pekerja seks komersial.

Penanganan untuk para penyandang masalah sosial ini harus melalui tahap rehabilitasi. Rehabilitasi tidak hanya penanganan untuk seseorang yang menderita sakit fisik tetapi juga dapat dilakukan pada seseorang yang menderita masalah sosial. Rehabilitasi bagi seseorang yang menderita penyakit sosial ini bertujuan untuk membantu mengarahkan agar seseorang tersebut dapat menjadi netral serta dapat berdaya di masyarakat dan dapat melakukan hubungan sosial dengan baik. Rehabilitasi itu sendiri sesuai dengan UU Kesos No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Khususnya pada pasal 7 ayat 1. Pada ayat 1 disebutkan bahwa "Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar".

Di Surakarta, terdapat tempat rehabilitasi sosial yang menerima mantan WTS untuk kawasan Jawa Tengah, yaitu Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) "Wanodyatama" Surakarta. Panti ini berdiri sejak jaman Pemerintah Kerajaan Surakarta dengan nama "Wangkung" dari kata dibuwang dan dikungkung, sebagaimana tempat penampungan bagi orang-orang yang mengalami permasalahan sosial. Mulai tahun 1951, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Praja Surakarta

dengan nama Panti Pamardi Wanita, sebagai tempat pembinaan bagi eks wanita tuna susila. Pada tanggal 11 September 1971, Panti Pamardi Wanita diserahkan kepada Kanwil Depsos Prov. Jawa Tengah, dan berdasarkan SK Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/XI/79, namanya diubah menjadi Sasana Rehabilitasi Wanita "Wanita Utama" Surakarta. Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, pengelolaan Panti diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Dinas Kesejahteraan Sosial berdasarkan Perda No. 11 Th. 2002, namanya diubah menjadi Panti Karya Wanita "Wanita Utama" Surakarta dengan Esselon IV/A. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 50 Th. 2008, Tanggal 20 Juni 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Panti Karya Wanita "Wanita Utama" Surakarta dengan Esselon III/A. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 60/71/2008 tentang Pembakuan Singkatan / Akronim, Nomenklatur, Kop Naskah Dinas dan Stempel Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Jawa Tengah, singkatan / akronim Panti Karya Wanita "Wanita Utama" adalah PAKARNITA "Wanita Utama" Surakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 111 Th. 2010, Tanggal 1 Nopember 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, berganti nama menjadi Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita Utama" Surakarta 1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Balai

Rehabilitasi Sosial "Wanita Utama" Surakarta 1 diubah menjadi Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita Utama" Surakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengahh Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, berganti nama menjadi Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) "Wanodyatama" Surakarta.

Di setiap tahap rehabilitasi, sudah pasti terjadi proses komunikasi didalamnya. Pola komunikasi yang dominan terjadi di Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) "Wanodyatama" Surakarta ini terjadi antara pekerja sosial dan penerima manfaat. Pembimbing yang bekerja di Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) "Wanodyatama" Surakarta ini disebut dengan pekerja sosial, sedangkan klien atau pasiennya disebut dengan penerima manfaat. Pola komunikasi pekerja sosial pada penerima manfaat di Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) "Wanodyatama" Surakarta menggunakan komunikasi antarpribadi / *interpersonal communication*, komunikasi kelompok dan komunikasi bermedia. Menurut Anggraini (2016) komunikasi antarpribadi digunakan pada saat bimbingan sosial pada bimbingan konseling individu. Adapun komunikasi kelompok digunakan pekerja sosial pada saat bimbingan fisik, bimbingan sosial yaitu pada bimbingan konseling kelompok, dinamika kelompok, bimbingan mental dan bimbingan ketrampilan. Selanjutnya komunikasi bermedia diterapkan penerima manfaat untuk membantu kelancaran proses

penerimaan pesan kepada penerima manfaat. Komunikasi bermedia biasanya dilakukan menggunakan media cetak, media elektronik, alat peraga, dan melalui gerakan.

Aktivitas komunikasi yang terjadi di Panti Pelayanan Sosial Wanita "Wanodyatama" Surakarta banyak menimbulkan hambatan komunikasi. Hal ini disebabkan kondisi penerima manfaat yang bermasalah, latar belakang dari masing-masing penerima manfaat di Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) "Wanodyatama" Surakarta ini berbeda-beda. Perbedaan latar belakang ini dapat diamati dari adanya penerima manfaat yang berasal dari hasil razia, diserahkan secara sengaja oleh keluarga; ada yang betah, ada pula yang tidak betah; ada yang terpaksa mengikuti aktivitas rehabilitasi, ada pula yang bersemangat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik; tatanan ekonomi yang berbeda; *broken home*; perbedaan kepribadian; lingkungan yang berbeda; dan seterusnya. Oleh karena itu, dengan berbagai latar belakang masing-masing penerima manfaat pastinya ada berbagai macam hambatan pula yang terjadi di dalamnya. Sebagai contohnya adalah penolakan dari penerima manfaat (PM) untuk berada di Panti ini dan mengikuti aktivitas di Panti ini sering terjadi. Penolakan yang mereka lakukan terjadi juga karena mereka tidak merasa bersalah atas apa yang mereka telah lakukan. Selain terjadi penolakan, faktor lain yang menjadi hambatan komunikasi yang ada di Panti ini adalah PM dengan tingkat pendidikan yang rendah. Lalu sikap PM yang tertutup, sehingga

saat diajak berkomunikasi mereka tidak mau menjawab atau hanya dengan memberikan senyuman pada yang diajak berkomunikasi.

Gangguan ini menyebabkan tujuan dari komunikasi antarpribadi antara Pekerja Sosial dan Penerima Manfaat dapat terhambat. Dengan adanya hambatan, komunikasi antarpribadi yang mereka lakukan tidak tersampaikan dengan baik maupun sempurna. Jika komunikasi tidak tersampaikan dengan baik, tujuan, visi, dan misi Panti Pelayanan Sosial Wanita "Wanodyatama" Surakarta ini tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu dibutuhkan strategi oleh Pekerja Sosial dalam menanggulangi hambatan komunikasi antarpribadi dengan PM yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti, apa saja hambatan yang ada dalam komunikasi antarpribadi Pekerja Sosial pada Penerima Manfaat di Panti Pelayanan Sosial Wanita "Wanodyatama" Surakarta serta strategi komunikasi dalam menanggulangi hambatan komunikasi yang terjadi, dengan judul "HAMBATAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PEKERJA SOSIAL DI PANTI PELAYANAN SOSIAL WANITA "WANODYATAMA" SURAKARTA".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah hambatan komunikasi antarpribadi yang dihadapi oleh Pekerja Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta?
2. Bagaimana strategi komunikasi dalam mengatasi hambatan komunikasi yang dihadapi oleh Pekerja Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengklasifikasikan hambatan komunikasi antarpribadi yang dihadapi oleh Pekerja Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta.
2. Untuk menjelaskan strategi komunikasi dalam mengatasi hambatan komunikasi yang dihadapi oleh Pekerja Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis Bagi Pihak yang Diteliti

Jika ada, melalui penelitian ini dapat ditemukan strategi yang sesuai dalam menanggulangi hambatan dalam komunikasi antar pribadi yang terjadi di Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta dalam melakukan aktivitas komunikasi dengan penerima manfaat, agar tujuan, visi, dan misi dari Panti ini dapat tercapai.

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi ilmu komunikasi terutama mengenai hambatan dan strategi komunikasi antarpribadi.